



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

Indek : Gubernur

Tanggal masuk : 01-04-2015
Kode : 16.862

Perihal / Isi ringkas : NP: Keberadaan Organisasi Jakarta
corruption water (dit d/ bekas bangpol)

Tgl. / No. Surat : 26.maret 2015 / 2116 / -1.862.42

Asal : Gubernur

Instruksi / Informasi *

Diteruskan / kepada :

KATA BAHAS BERKATA

01
04 '15

B. Nierka
TL Ai

NB. PH

1. P. ALBERTO
@-PURA 1/4/15

2.

3.

4.

5.

6.

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

* Coret vano tidak perlu



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Tanggal Masuk : 01/03/2015

Indek: Gubernur

Kode : 1684

Hal/isi Ringkas

ND: Keberadaan Organisasi Jakarta
Corruption Watch.
(Surat dr. Bakesbangpol).

Tgl./Nomor Surat

26 Maret 2015 / 216 / - 1.862.42.

Asal

Gubernur

Instruksi / Informasi :

*4 prek Hlhas
- Pelayan
- Bagaimana dr. Disinformasi?*

Diteruskan / kepada :

- ① Sekretaris
2. Kabid Media Massa
- ③ Kabid Informasi Publik
4. Kabid SIM
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

* Coret yang tidak perlu



No. Urut

006897

Kode

P

Tgl. Surat

26-03-2015

Tgl. K/M

27-03-2015



DARI : BAKESBANGPOL PROV DKI JAKARTA

KEPADA : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Ringkasan surat / disposisi

MENYAMPAIKAN LAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI JAKARTA
CORRUPTION WATCH, SEBAGAIMANA TERCANTUM.

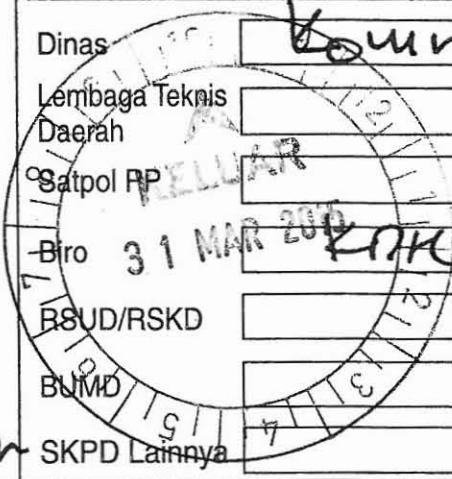
D

Wakil Gubernur	<input type="checkbox"/>
Sekretaris Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>
Deputi Gubernur Bidang :	
Asisten :	
Pemerintahan	<input type="checkbox"/>
Adm. & Keuangan	<input type="checkbox"/>
Pembangunan & LH	<input type="checkbox"/>
Perekonomian	<input type="checkbox"/>
Inspektorat	<input type="checkbox"/>
Kesra	<input type="checkbox"/>
BPKAD	<input type="checkbox"/>
Bappeda	<input type="checkbox"/>
Walikota :	
Bupati Kepulauan Seribu	
Dinas	<input checked="" type="checkbox"/>
Lembaga Teknis Daerah	<input type="checkbox"/>
Satpol RP	<input type="checkbox"/>
Biro	<input checked="" type="checkbox"/>
BSUD/RSKD	<input type="checkbox"/>
BUMD	<input type="checkbox"/>
SKPD Lainnya	<input type="checkbox"/>

27/3

tl.
tdh kabulkan! 27/3

Bisa baca dan lihat di website
Jakarta.go.id semua data?





006897

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 2116 / - 1.862.42
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keberadaan Organisasi Jakarta Corruption Watch

Memperhatikan disposisi Bapak pada surat Jakarta Corruption Watch Nomor 905/LSM JCM / II / 2015 tanggal 24 Februari 2015 perihal Permintaan Hak hukum Bukti Salinan/Foto Copy DPA APBD 2014 Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap 88 paket kegiatan sesuai nama paket kegiatan terlampir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Gambaran umum.

1. Pada Data Base Ormas/LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta masa berlaku Organisasi Jakarta Corruption Watch sesuai tertera di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) telah berakhir pada Tahun 2009, sampai dengan saat ini Organisasi Jakarta Corruption Watch tidak melakukan perpanjangan sehingga dinyatakan tidak terdaftar.
2. Jakarta Corruption Watch dalam kegiatan operasionalnya umumnya menyoroti aktivitas kerja APBD DKI Jakarta khususnya di Lingkungan Dinas Pendidikan.
3. Terkait dengan isi surat Jakarta Corruption Watch Perihal permintaan Foto Copy/Salinan DPA APBD 2014 Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap 88 Paket Kegiatan tersebut secara umum data tersebut dapat diperoleh melalui Website Pemda DKI Jakarta (Jakarta.go.id) dan dapat diberikan sepanjang tidak membebani Anggaran Dikmen Jakarta Barat dalam pengandaannya.
4. Terkait dengan Dokumen yang dimintakan berupa Kontrak Kerja, Berita Acara Serah Terima Barang, dan surat perintah pencairan SP2D merupakan Pertanggungjawaban yang dikecualikan untuk tidak diberikan secara umum.
5. Penyalahgunaan Dokumen tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu bahan pertimbangan menjadi dasar tidak menyerahkannya.

B. Tanggapan dan Saran.

1. Organisasi Jakarta Corruption Watch tidak melakukan perpanjangan sehingga dinyatakan tidak terdaftar, dan tidak dapat menerima pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Permintaan atas data yang berupa Dokumen Pertanggungjawaban tidak wajib untuk diserahkan terkecuali kepada yang berwenang dan Penyidik seperti Badan Keuangan dan Asset, Inspektorat, BPKP, BPK RI, Kejaksaan dan Kepolisian.

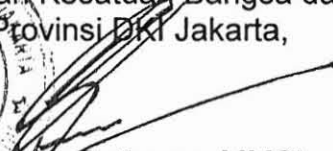
2014
31-03
2015

27 MAR 2015

008477 *Carub*

4. Tembusan surat yang ditujukan kepada 2 (dua) orang Pejabat tersebut mengindikasikan bahwa kedua orang pejabat tersebut sebelumnya tidak melayani sehingga melalui surat yang dilayangkan dengan harapan mendapat perhatian (Modus Operandi yang umum dipakai oleh Ormas/LSM tertentu).
5. Agar tidak menjadi preseden buruk kedepannya dan sebagai alat yang dipakai oleh Ormas/LSM dengan tujuan-tujuan tertentu, maka kami sarankan untuk tidak mengabdikan dan menanggapi surat tersebut.

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Jakarta, 26 Maret 2015
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta,

Drs. H. Ratiyono, MMSI.
NIP 195909271984031010

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.